

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH
DASAR NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 01 Pekanbaru)**

Oleh : Tiffany Ramadhani Hasibuan

Email : tiffanyramadhani@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Pekanbaru City issued a policy of merging and closing public elementary schools in the government environment of Pekanbaru City in the efficiency of local government budgets. During the implementation at SDN 01, the parents of students at SDN 01 Pekanbaru were rejected. the parents of the students refused to merge schools, seeing the inadequate facilities and infrastructure. So that at the beginning of the implementation, students carried out teaching and learning activities at the mosque. The purpose of this study indicate the results of the implementation of a policy of closing and merging public elementary school in the government environment of Pekanbaru especially at SDN 01 Pekanbaru and showed limitations in the implementation of a policy of closing and merging public elementary school as found in the pekanbaru mayor's decision Number 289 in 2019. This research uses the theory of policy implementation by Van metter and Van Horn (2016) which uses 6 indicators, namely : Policy Standards and Objectives, Resources, Communication between organizations and implementing activities, Characteristics of implementing agencies, Socioeconomic and political conditions and disposition. This study used qualitative methods which are located in the city of Pekanbaru. Informants of this research that head of field elementary school at the service education of pekanbaru city and The principal of elementary school 1 pekanbaru and other relevant institutions by doing interviews, observations and documentation so that it gets the required data such as primary data and secondary data then analyzed showing the results of the implementation and its limitations. The results of this research found that implementation of a policy of closing and merging public elementary school in the government environment of Pekanbaru City has not been implemented to the fullest, caused by several inhibitory factors, Rejection of target group and adaptation between implementor and target group so that the implementation process does not run to the maximum.

Keywords: *Implementation, policy, Closing and Merging Public Elementary Schools*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan menengah. Syarat berdirinya sekolah yang tertera pada pasal 4 ayat 1 meliputi:

- a. Hasil studi kelayakan
- b. Isi Pendidikan
- c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Sarana dan prasarana Pendidikan
- e. Pembiayaan Pendidikan
- f. Sistem evaluasi dan sertifikasi
- g. Manajemen dan proses Pendidikan.

Untuk itu apabila satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat menutup satuan Pendidikan, yang dinyatakan pada pasal 15 ayat 1 menyatakan, penutupan satuan Pendidikan dilakukan apabila satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan dan/atau satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Penutupan satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diikuti pada pasal 4 yaitu dengan penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama dan penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Penutupan dan Penggabungan satuan pendidikan sudah banyak di laksanakan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sudah melaksanakan penggabungan satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, khususnya di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan peneliti yang mempengaruhi penutupan dan penggabungan sekolah yaitu jumlah peserta didik setiap tahun berkurang dan perkarangan siswa bermain sangat sempit. Bangunan satuan Pendidikan yang berdekatan juga mempengaruhi lahan untuk bermain siswa. Maka, dalam memenuhi standar pelayanan minimal pada Pendidikan dasar, Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 ayat (2) yaitu, dibutuhkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan pemerintah harus menyediakan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, namun jumlah peserta didik tidak memenuhi pada beberapa satuan Pendidikan yang tersedia di satu lokasi yang sama, akan menjadi beban untuk pemerintah daerah dalam hal membesarnya biaya oprasional sekolah, yang menjadi tidak efisien.

Untuk itulah perlu adanya solusi untuk mengatasinya, salah satunya dengan melaksanakan penutupan dan penggabungan Sekolah Dasar. Berdasarkan dari arahan kemendikbud yang telah menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah BAB VI tentang penutupan satuan pendidikan, wali kota Pekanbaru mengeluarkan keputusan nomor 289 tahun 2019 tentang penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru tahun 2019. Berdasarkan keputusan walikota tersebut, diputuskan bahwa pemerintah kota Pekanbaru melakukan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri yang ada dilingkungan kota Pekanbaru. Dinilai lebih tepat karena siswa setiap tahun berkurang, dan perkarangan siswa bermain sangat sempit, dan mampu mengefisien biaya oprasional, dan mampu menghemat APBD tanpa mengabaikan kebutuhan akan pelayanan Pendidikan bermutu dan bermartabat. Untuk lebih jelasnya sekolah yang ditutup dan menjadi tujuan penggabungan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penutupan Dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Sekolah Yang Ditutup	Alamat	Kecamatan	Sekolah Tujuan Penggabungan
1	SDN 12 Pekanbaru	Jl. Pepaya No.53	Sukajadi	SDN 6 Pekanbaru
2	SDN 53 Pekanbaru	Jl. Sawai	Sukajadi	SDN 22 Pekanbaru
3	SDN 54 Pekanbaru	Jl. Murai No.24	Sukajadi	SDN 79 Pekanbaru
4	SDN 75 Pekanbaru	Jl. Balam	Sukajadi	SDN 68 Pekanbaru
5	SDN 121 Pekanbaru	Jl. Pepaya No.53	Sukajadi	SDN 15 Pekanbaru
6	SDN 154 Pekanbaru	Jl. Semangka No. 17	Sukajadi	SDN 153 Pekanbaru
7	SDN 155 Pekanbaru	Jl. Semangka No. 17	Sukajadi	SDN 153 Pekanbaru

8	SDN 10 Pekanbaru	Jl. Ahmad Yani	Senapelan	SDN 1 Pekanbaru
9	SDN 156 Pekanbaru	Jl. Teratai	Senapelan	SDN 1 Pekanbaru
10	SDN 33 Pekanbaru	Jl. Samanhuri No. 06	Senapelan	SDN 134 Pekanbaru
11	SDN 38 Pekanbaru	Jl. Abdul Muis Cinta Raja	Sail	SDN 26 Pekanbaru
12	SDN 4 Pekanbaru	Jl. Sultan Syarif Qasyim	Limapuluh	SDN 31 Pekanbaru
13	SDN 24 Pekanbaru	Jl. Tanjung Uban No. 17	Limapuluh	SDN 7 Pekanbaru
14	SDN 52 Pekanbaru	Jl. Rokan No. 76	Limapuluh	SDN 23 Pekanbaru
15	SDN 63 Pekanbaru	Jl. Pesisir Gg. Natuna No. 01	Rumbai Pesisir	SDN 65 Pekanbaru
16	SDN 101 Pekanbaru	Jl. Jendral	Payung Sekaki	SDN 70 Pekanbaru
17	SDN 78 Pekanbaru	Jl. Dahlia Indah	Tenayan Raya	SDN 90 Pekanbaru
18	SDN 129 Pekanbaru	Jl. Banda Aceh No.39	Bukit Raya	SDN 43 Pekanbaru

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 289 tahun 2019

Tabel diatas adalah daftar sekolah yang ditutup dan sekolah tujuan penggabungan pada keputusan walikota Pekanbaru nomor 289 tahun 2019 tentang penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada 12 maret 2019, maka keputusan sudah berlaku, untuk itu terhitung tahun pelajaran 2019/2020 sekolah dasar negeri sesuai daftar diatas ditutup dan tidak beroprasional lagi dan jumlah sekolah dasar negeri di kota Pekanbaru berjumlah 176 sekolah di 12 kecamatan. Daftar tersebut terdiri dari, 18 sekolah yang ditutup dan 16 sekolah yang menjadi tujuan penggabungan.

Dari daftar sekolah yang sudah melakukan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri, salah satunya SDN 156 dan SDN 10 yang akan digabungkan ke

SDN 01 yang mana menjadi fokus penelitian ini, karena Implementasi pada sekolah tersebut terindikasi tidak berjalan dengan baik. pada pelaksanaan implementasi pada SDN 01 Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, terjadi penolakan dari walimurid SDN 01 Pekanbaru, hingga terjadi demo pada hari pertama masuk sekolah. Masalahnya, siswa dari SD 01 belajar di halaman sekolah akibat kekurangan kelas pada tahun ajaran baru 2019/2020 yang akhirnya pihak sekolah memutuskan kegiatan belajar dipindah ke mushola dan fasilitas lainnya seperti tidak memiliki perpustakaan, UKS, dan untuk ruang guru hanya ada dibawah tangga. Kurikulum yang di gunakan antara sekolah yang ditutup dengan sekolah tujuan penggabungan juga berbeda, hal ini memicu terjadinya kesenjangan dalam proses belajar mengajar. Selain itu setelah akan digabung, bangunan SDN 156 akan dialih fungsikan menjadi pasar. Ini yang membuat wali murid semakin tidak terima. Akibat dari rencana penggabungan sekolah dasar ini pun membuat para guru kebingungan dalam mengatur pola pengajaran karena tidak adanya kejelasan sistem dan pola penggabungan sekolah.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Implementasi Kebijakan Penutupan Dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 01 Pekanbaru)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis menemukan

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru ?
2. Apa saja yang menjadi faktor – faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang yaitu Pemerintah Daerah Pekanbaru kota dan khusus nya Dinas Pendidikan kota sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggabungan sekolah dasar di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang membahas permasalahan yang sama di masa akan datang serta berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

KONSEP TEORI

2.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, **Greer and Paul Hoggett (1999:5)** memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Apa yang dikemukakan Anderson, Budiardjo, Friedrich, Post, et al., serta Greer and Paul Hoggett mengenai konsep kebijakan terdapat kesamaan, yaitu mereka sama-sama memfokuskan diri pada suatu Tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau sasaran dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau kelompok tertentu.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh

diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja **Nugroho (2009:11)**.

Atas dasar uraian diatas, maka dapat ditemukan beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik, sebagai berikut: i) kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, ii) kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, iii) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan, iv) kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), dan v) kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut **Quade dalam Sidik (2014:110)**, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa

dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Donald Van Metter dan Van Horn dalam **Mulyadi (2016:73)** menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas agak kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan akuntabilitas dari sumber daya- sumber daya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.terlalu merubah perilaku manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras itu, cakupan luas wilayah implementasi kebijakan maka seharusnya semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil untuk terjadinya lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan internal.

4. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi nonformal yang akan terlibat mengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha mengubah perilaku manusia yang radikal, maka agen pelaksana harus tegas dan ketat pada aturan dan sanksi hukum. Sedangkan apabila kebijakan dibuat bukan untuk mengubah perilaku manusia maka agen tidak perlu setegas pada gambaran pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

5. Kondisi sosial ekonomi dan politik

Hal ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik, lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi, karena itu upaya implementasi mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

6. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal mungkin sangat terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan lah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan tetapi kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

2.3 Kebijakan Pendidikan

Menurut **Nugroho** dalam **Purba (2017: 6)** kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan tersebut diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi organisasi sosial dalam bentuk lembaga lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Bascia dalam **Purba (2017: 6)** menyatakan pada dasarnya kebijakan pendidikan dipahami sebagai suatu rasionalisasi rencana yang secara sadar diartikulasikan oleh suatu badan otoritas, pemerintah atau instansi pemerintah, yang menyusun naskah atau undang-undang atau

peraturan yang berkaitan dengan harapan yang jelas mengenai tindakan eksplisit maupun implisit yang menekankan pada kewenangan formal pemerintah dalam mengambil tindakan.

2.4 Penggabungan Sekolah

Penggabungan sekolah dasar menurut **Sarwa Wibawa** dalam **Purwaningsih (2014:18)**, penggabungan sekolah dasar merupakan satu cara pengembangan sekolah dengan memberdayakan dan mengembangkan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas sekolah. Dapat diartikan penggabungan sekolah merupakan proses penyatuan dua sekolah atau lebih sekolah untuk meningkatkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sama halnya seperti penggabungan badan usaha, di dalam penggabungan sekolah terdapat peleburan aset yang diharapkan aset tersebut mampu memenuhi standar pelayanan minimal bagi sekolah yang bersangkutan.

Adapun tujuan penggabungan sekolah menurut **Suparlan (2006)** meliputi (1) meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat. Dalam arti layanan pendidikan harus bermutu, bukan hanya layanan pendidikan dengan gedung sekolah yang seadanya; (2) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, karena keberadaan beberapa sekolah dalam satu kompleks gedung sekolah yang sempit menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan yang lain, sehingga perlu dilakukan penggabungan sekolah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dookumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (**Sugiyono, 2017:9**). Adapun penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi dilapangan terkait dengan kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru, dengan lokus kantor Dinas Pendidikan kota Pekanbaru dan Sekolah Dasar Negeri 01 kota pekanbaru. Alasan memilih Dinas Pendidikan Kota Pekabaru sebagai lokasi penelitian karena Dinas Pendidikan kota Pekanbaru sebagai pihak implementor dari implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. SDN 01 Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena sebagai sekolah tujuan penggabungan yang telah menerapkan implementasi penutupan dan penggabungan sekolah negeri, adanyaanya penolakan dari walimurid terhadap

implementasi kebijakan penutupan dan penggabungan di SDN 1 Pekanbaru.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Kasi kurikulum dan Penilaian SD
2. Kasi ketenagaan bidang SD
3. Staff kasi ketenagaan bidang SD
4. Kepala sekolah SDN 01 Pekanbaru
5. Guru kelas SDN 01 Pekanbaru
6. Komite SDN 01 Pekanbaru

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut **Siyoto & Sodik (2015:67)** data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini didapatkan dengan cara mewawancarai informan dalam hal ini pihak dinas Pendidikan kota pekanbaru yang mengetahui kebijakan penggabungan sekolah dasar kota pekanbaru.

2. Data Sekunder

Menurut **Siyoto & Sodik (2015:68)** data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 289 Tahun 2019 Tentang penutupan Dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun 2019

3.5 Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg** dalam **Sugiono (2017:114)** merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiteratur dengan mengajukan pertanyaan bebas kepada informan yaitu pihak dinas Pendidikan kota dan pihak sekolah dasar negeri 01 Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terusterang atau tersamar dengan melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data dalam hal ini Dinas Pendidikan kota pekanbaru dan perangkat Sekolah Dasar Negeri 01, bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri di kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa

dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Seperti data Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Sekolah yang berkaitan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Sekolah.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data model **Miles dan Hubberman dalam sugiyono (2017)** dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri kepada dinas Pendidikan kota pekanbaru.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowhart, dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data terkait implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri menggunakan teks naratif. Dan selanjutnya mencari faktor-faktor yang menghambat tidak terwujudnya implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri khususnya pada SDN 01 Pekanbaru yang optimal untuk dianalisis kemudian dikategorikan dan disajikan dalam bentuk gambar.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, menarik kesimpulan setelah menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri khususnya pada SDN 01 Pekanbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Penutupan Dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru.

4.1.1 Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran yang di gunakan pada implementasi ini sesuai dengan peraturan menteri dan kebudayaan republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan menengah pada pasal 15 yang menyatakan penutupan satuan Pendidikan dilakukan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan. Untuk itu dinas Pendidikan kota Pekanbaru mengeluarkan keputusan walikota Pekanbaru nomor 289 tahun 2019 tentang penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor utama ialah jumlah usia anak sekolah semakin berkurang dan kondisi sekolah yang tidak memadai. Pihak sekolah dan walimurid juga memahami faktor utama implementasi ini ialah jumlah rombongan belajar yang terus berkurang setiap tahunnya dan juga lokasi sekolah lebih kepada lokasi

perkantoran pemerintahan. Untuk itu, dinas Pendidikan sebagai yang mengeluarkan keputusan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru atau sebagai implementor sudah tepat mengimplementasikan keputusan tersebut. Dilihat dari faktor - faktor utama implementasi ini sudah sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Serta dukungan dari agen pelaksana, yaitu dari pihak SDN 1 Pekanbaru.

4.1.2 Sumber Daya

Ketersediaan segala sumber daya yang dibutuhkan sangat mempengaruhi kinerja implementor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan pada implementasi ini baik dari manusianya, waktu dan uang harus terpenuhi supaya implementasi berjalan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan implementor sebagai sumber daya dalam pelaksanaan tidak ada kejelasan tim yang di tunjuk dengan kejelasan dikeluarkan SK, dilihat dari perbedaan pernyataan antara kasi ketenagaan SD dengan staff kasi ketenagaan SD. Pada SDN 01 Pekanbaru, dalam hal sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik sudah cukup terpenuhi. Meskipun demikian, pada SDN 01 setelah penggabungan dengan SDN 10 dan SDN 156, pengelolaan tidak menjadi tanggung jawab SDN 01 untuk pengelolaannya, karena untuk sekolah yang ditutup akan dialih fungsikan oleh pemerintah daerah menjadi fasilitas publik. untuk kebutuhan ruang kelas, setelah penggabungan, masih terdapat ruang kelas yang kosong, namun untuk kebutuhan perkarangan siswa bermain, menjadi sempit. Kebutuhan sumber daya baik manusia dan materil untuk implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar masih belum

cukup terpenuhi dari segi sarana dan prasarana sehingga implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri belum optimal.

4.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

komunikasi merupakan variabel yang sangat berpengaruh pada kinerja implementor dalam menyelenggarakan kebijakan. Kurangnya komunikasi atau adanya miskomunikasi akan menimbulkan kesalahan persepsi yang dapat berakibat pada kesalahan dalam melaksanakan tugas. Sebagai implementor dari keputusan walikota nomor 289 tahun 2019 tentang penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru, dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah serta walimurid diperlukan komunikasi yang baik diantara instansi penyelenggara, sehingga implementasi berjalan baik. komunikasi dapat dilakukan melalui kegiatan pertemuan/rapat untuk membahas berbagai permasalahan yang memerlukan koordinasi antar instansi.

Bentuk sosialisasi baik dari pihak implementor kepada kepala sekolah dan dari pihak sekolah kepada walimurid sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya panggilan untuk kepala sekolah sekolah yang ditutup dan yang menjadi tujuan penggabungan oleh pihak implementor dan dikeluarkannya SK daftar sekolah yang ditutup dan digabung. Dari pihak sekolah juga menyampaikan dengan bentuk sosialisasi langsung kepada walimurid, dan berjalan dengan baik. Komunikasi antar pihak sudah cukup baik dengan komunikasi satu arah pihak sekolah dan walimurid sudah cukup memahami apa yang ingin dicapai dari implementasi ini sehingga implementasi penutupan dan penggabungan dapat berjalan dengan optimal.

4.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, sangat mempengaruhi kinerja implementor dalam menyelenggarakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. Implementor yaitu pihak dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, pihak sekolah, dan walimurid dalam melaksanakan peran harus memberikan dukungan untuk keberhasilan implementasi. Penulis mencoba mengangkat dan membahas Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui dukungan dari masyarakat dan orang tua serta komite SDN 1 Pekanbaru sendiri masih kurang mendukung untuk penutupan sekolah pada awal implementasi dan memicu terjadinya demo di SDN 1 Pekanbaru. Keresahan wali murid yang menolak implementai penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri karena ada kebimbangan terhadap budaya mengajar yang berbeda-beda, serta ruang lingkup anak untuk bermain dan belajar semakin terbatas dengan dibangun tembok tinggi. Sehingga memicu penolakan dari walimurid. Untuk itu pihak sekolah maupun pihak dinas terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada walimurid, sehingga seiring berjalannya waktu, walimurid memahami dan sekolah sudah berjalan dengan baik. Tindakan pihak dinas sudah cukup baik dengan terus langsung memberikan pendekatan-pendekatan kepada walimurid

untuk meredakan konflik dan tidak diam saja. Sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Karakteristik agen pelaksana baik dari pihak dinas, pihak sekolah serta walimurid, dalam implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri masih belum cukup mendukung. Walimurid memberikan penolakan hingga terjadi demo pada SDN 1 Pekanbaru, sehingga implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri tidak maksimal.

4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

kondisi sosial, ekonomi dan politik pada implementasi mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik, lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi, karena itu upaya implementasi mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Masyarakat disekitar sekolah yang juga sebagai walimurid cukup mempengaruhi implementasi ini.

kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementai penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. Dilihat dari lingkungan sekolah terutama yang berlokasi disekitar pasar sentral, dengan penduduk usia anak sekolah yang terus berkurang setiap tahunnya. Keadaan seperti itu mendukung untuk dilaksanakannya penutupan sekolah dasar pada SDN 10 dan SDN 156 dan digabungkan ke SDN 1 Pekanbaru yang berlokasi disekitar pasar sentral.

Dengan melihat usia anak sekolah yang terus berkurang setiap tahunnya,

terutama untuk sekolah dasar negeri yang berlokasi disekitar pasar sentral, yaitu SDN 1 Pekanbaru, tidak menutup kemungkinan untuk ditutup juga dan diserahkan kepada disperindag seperti halnya yang terjadi pada SDN 19 yang sudah ditutup dan dijadikan pasar. pada awal implementasi, beredar informasi mengenai alih fungsi bangunan pada sekolah yang ditutup akan dijadikan pasar diserahkan pada disperindag, ini salah satu yang memicu terjadinya penolakan pada penutupan SDN 10 dan SDN 156 yang digabungkan ke SDN 1 Pekanbaru. Hal hal seperti ini yang kurang mendukung implementasi berjalan lancar.

Implementor dalam hal ini pihak dinas Pendidikan kota Pekanbaru untuk menjaga kondisi tetap kondusif, sudah cukup baik dengan melakukan musyawarah mufakat, dengan langsung datang kelokasi kejadian, serta terus melakukan pendekatan pendekatan dengan walimurid dan masyarakat sekitar. Pihak sekolah dalam menjaga keadaan tetap kondusif juga sudah cukup baik, dengan memberikan pemahaman kepada walimurid. Sehingga implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru bisa berjalan dengan cukup baik.

4.1.6 Disposisi

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi niat yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman dari implementor dalam implementasi penutupan dan penggabungan

sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru sudah cukup baik. Implementor dapat menjelaskan secara konsep, pelaksanaan, serta tujuan implementasi. Pemahaman yang dimiliki implementor juga sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak sekolah dan walimurid. sehingga dengan pemahaman implementor yang sudah cukup baik, implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru dapat berjalan dengan cukup optimal.

4.2 Faktor Penghambat Implementasi Penutupan Dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru Khususnya pada SDN 01 Pekanbaru

4.2.1 Pengelolaan sarana dan Prasarana

Pengelolaan yang baik akan mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu kebijakan yang akan mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan dan tercapainya tujuan dari implementasi. Dalam hal ini pada implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya SDN 01 Pekanbaru, perlu penerimaan dari pihak-pihak terkait terutama walimurid dan masyarakat sekitar sekolah.

Yang mempengaruhi penerimaan implementasi yaitu kekhawatiran walimurid akan ruang bermain anak yang semakin berkurang setelah adanya penutupan dan penggabungan sekolah. Harapan walimurid pada penggabungan sekolah pada SDN 1, untuk ruang bermain anak bertambah luas bukan semakin berkurang. Selain opini masyarakat akan ruang bermain anak, beredar pula isu - isu yang menggiring walimurid serta masyarakat untuk melakukan demo, isu-isu yang beredar ialah untuk sekolah yang sudah ditutup akan dijadikan pasar. penolakan dari walimurid

dan masyarakat hingga berujung konflik, khususnya yang terjadi pada SDN 1 Pekanbaru, membuat implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru menjadi tidak kondusif dan tidak berjalan cukup baik.

Penolakan oleh walimurid terjadi pada awal implementasi, sehingga awal implementasi terjadi keributan yang berujung demo oleh walimurid, sehingga implementasi terkendala. Implementor terus melakukan pendekatan kepada walimurid dengan memberikan pemahaman bahwa Gedung sekolah yang sudah ditutup tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dijadikan pasar ataupun ruang terbuka hijau. Dengan melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman, walimurid dapat menerima implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri pada SDN 01 Pekanbaru.

4.2.2 Adaptasi antar implementor dengan target group

Kedadaan sosial dan ekonomi mempengaruhi pada keberhasilan implementasi. Pelaksana yang menjalankan implementasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi itu sendiri. lambatnya proses adaptasi antara guru, antara guru dan murid, dan antara murid itu sendiri. Untuk siswa dan guru dari sekolah yang ditutup perlu melakukan adaptasi kepada sekolahnya yang baru. Kurangnya penyesuaian antara guru dan murid membuat kendala pada implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri khususnya pada SDN 1 Pekanbaru. Selain itu, terdapat kendala pada siswa yang kekurangan buku, ini dikarenakan siswa tersebut dari sekolah yang sudah ditutup sekolahnya masih kekurangan buku, sehingga pada sekolah tujuan penggabungan kesulitan dalam pengadaan bukunya. Terjadi kendala juga pada kurikulum yang digunakan, yaitu terdapat perbedaan

kurikulum antar sekolah yang sudah ditutup dengan sekolah tujuan penggabungan, sehingga sekolah kesulitan dalam mengadakan pengajaran. Kendala ini mempengaruhi kegiatan belajar mengajar pada SDN 01 setelah pelaksanaan implementasi.

Kekhawatiran dari walimurid akan budaya mengajar disekolah yang berbeda-beda akan mempengaruhi anaknya belajar disekolah. Tentu ini mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. adanya perbedaan cara mengajar juga akan mempengaruhi siswa dalam proses belajar setelah dilakukannya penggabungan sekolah pada SDN 1. Sehingga implementasi ini setelah pelaksanaannya berdampak pada kegiatan belajar siswa. Maka, implementasi pada SDN 01 kurang optimal.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada Sekolah Dasar Negeri 01 Pekanbaru kurang maksimal. Implementasi kebijakan pada SDN 01 mempengaruhi kualitas dari pelayanan Pendidikannya. Sarana dan prasarana yang diberikan tidak memenuhi standar pelayanan minimal pada satuan Pendidikan dasar. Sistem pengajaran juga terganggu pada awal pelaksanaan. Implementor yang kurang tanggap dalam melihat kondisi yang terjadi, juga mempengaruhi implementasi pada SDN 01 Pekanbaru. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat pada implementasi.
2. Faktor – faktor yang menghambat dari implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota

Pekanbaru khusus nya pad SDN 01 Pekanbaru, ialah dari sarana dan prasarana yang di berikan belum memenuhi harapan walimurid setelah adanya penggabungan, sehingga membuat walimurid menolak penggabungan sekolah pada SDN 01 pada awal tahun ajaran baru. Sistem pengajaran menjadi terganggu, karena perbedaan kurikulum yang digunakan peserta didik dari sekolah yang ditutup dengan peserta didik dari sekolah tujuan penggabungan, sehingga mempengaruhi sekolah dalam pendanaan untuk pengadaan buku untuk siswa pindahan dari sekolah yang ditutup. Guru dan murid perlu adaptasi karena pernedaan budaya mengajar.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan kota Pekanbaru sebagai implementor dalam melaksanakan penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri dilingkungan pemerintahan kota pekanbaru khususnya pada SDN 01 Pekanbaru, perlu melakukan penyesuaian kondisi sekolah sebelum dan setelah implementasi pada SDN 01 dengan berkoordinasi, bekerjasama, dan berkomunikasi antara implementor dengan terget group dengan baik. Pihak Dinas Pendidikan kota Pekanbaru perlu lebih tanggap lagi menanggapi masalah yang terjadi pada SDN 01 Pekanbaru, seperti perlu mekakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada walimurid dan masyarakat sekitarnya. Sehingga pelaksanaan implementasi dapat berjalan dengan baik.
2. Masyarakat sekitar SDN 01 dan walimurid SDN 01 perlu lebih memahami tujuan dan manfaat dari implementasi penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri, sehingga tidak menimbulkan penolakan dari walimurid. Pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada walimurid perlu lebih jelas lagi, baik dari tujuan dan manfaat. Tenaga pendidik perlu melakukan penyesuaian mengajar lebih baik lagi sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik setelah implementasi penggabungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI-press
- Muhammad Munadi dan Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Arruzmedia
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Dr. Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yusuf A Muri. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2018). Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018. 1–340.

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 289 Tahun 2019 Tentang penutupan dan penggabungan sekolah dasar negeri di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru tahun 2019

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Dengan.

Karya ilmiah

Erowati, M. T., Slamet, & Wasitohadi. (2018). Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 152–164.

Ima Silfia Purba. (2017). *Implementasi Kebijakan Menti Pendidikan No. 53 Tahun 1996 Tentang Sekolah Lanjutan*

Pertama Terbuka (Studi Kasus SMP Terbuka Pekanbaru). Universitas Riau, Pekanbaru.

Nugroho, R. T. (2018). Dampak Regrouping Sekolah Terhadap Prestasi Ujian Akhir Nasional Siswa Sdn Mijen Surakarta D.

Suartha, N., & Fakultas. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, XII(1), 1–7.

Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.

Wahdan Najib Habiby., dkk (2018). Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan Dan Problem Sekolah Wahdan. *PROFESI PENDIDIKAN DASAR*, 5(2), 177–184.

Sukma Alfalah. (2018). Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik Di Sekolah Dasar Tahun 2015. *JOM FISIP*, 5(1), 1–14.

Skripsi

Purwaningsih, I. (2014). *Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar Di Kabupaten Purworejo*.

Website

Bertuahpos.com. (2019, 10 Juli). *Protes Orang Tua Gelar Unjuk Rasa, Bangunan SDN 156 Pekanbaru Akan Disulap Jadi Pasar*. Dikutip 30 November 2020 dari <https://bertuahpos.com/berita/terkini/protes-orang-tua-gelar-unjuk>

rasa-bangunan-sdn-156-pekanbaru
akan-disulap-jadi-pasar.html?amp

IDNJurnal.com. (2019, 10 Juli). *Wali Murid Tolak Penggabungan Tiga SD di Pekanbaru*. Dikutip 30 November 2020 dari <https://www.idnjurnal.com/news/cetak/5754/wali-murid-tolak-penggabungan-tiga-sd-di-pekanbaru>

Tribunpekanbaru.com. (2015, 30 Juli). *Firdaus: Bangunan SDN 019 tak Dirobohkan, tapi Direnovasi untuk Pasar*. Dikutip 12 Desember 2019 dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/30/firdaus-bangunan-sdn-019-tak-dirobohkan-tapi-direnovasi-untuk-pasar>.